

# SKRIPSI

## PENGATURAN KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL ( *SHIP TO SHIP TRANSFER* ) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**Dr. Najmi, S.H.,M.H.,  
Dewi Enggriyeni, S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

**Pengaturan Kegiatan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal ( *Ship To Ship Transfer* ) Berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional serta Implementasinya di Indonesia**

( Hafid Zulfi, 1610112030, Dr. Najmi, S.H.,M.H., Dewi Enggriyeni, S.H.,M.H.,Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2023, 62 Halaman)

**ABSTRAK**

Wilayah laut Indonesia khususnya laut teritorial Indonesia merupakan wilayah laut yang banyak terjadi berbagai bentuk kegiatan atau aktivitas manusia, pada area pelabuhan merupakan salah satu area yang banyak terjadi berbagai kegiatan baik dalam hal transportasi laut, bisnis, perdagangan maupun dalam kegiatan ekspor dan impor, salah satu bentuk kegiatannya adalah kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di area pelabuhan yang selanjutnya disebut sebagai *ship to ship transfer*. Bidang kegiatan bongkar muat barang merupakan salah satu kegiatan yang terjadi di area pelabuhan baik dari dan ke kapal dalam hal pemindahan muatan atau barang tertentu yang sudah mendapat izin dari otoritas pelabuhan dan tentunya sudah adanya dokumen resmi atas pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang. Tentunya setiap kegiatan *ship to ship transfer* diatur dan diawasi oleh berbagai peraturan internasional dan nasional yang memberikan pedoman dan batasan terhadap kegiatan *ship to ship transfer*. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1). Bagaimana pengaturan *ship to ship transfer* dalam Hukum Internasional ? dan 2). Bagaimana implementasi kegiatan *ship to ship transfer* di Indonesia ?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data yaitu data sekunder yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah pengaturan kegiatan *ship to ship transfer* dalam Hukum Internasional adalah terdapat dalam berbagai bentuk peraturan pada faktor tertentu tersendiri yang dijelaskan secara terpisah berdasarkan faktor terkait dari pokok isi peraturan tersebut , menurut UNCLOS 1982, SOLAS 1974 dan MARPOL Convention 1973/1978 serta implementasinya di Indonesia juga terdapat penjelasan terpisah dari berbagai peraturan seperti UU.No,17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan PM Perhubungan RI No. 59 tahun 2021 tentang penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.

**Kata Kunci : Implementasi, Bongkar Muat Barang, Pelabuhan, dan Laut Teritorial.**

**Arrangements for Loading and Unloading Activities from and to Ships ( Ship  
To Ship Transfer ) Based on International Law and National Law and Its  
Implementation in Indonesia**

( Hafid Zulfi, 1610112030, Dr. Najmi S.H, M.H, Dewi Enggriyeni, S.H, M.H,  
Faculty of Law, Andalas University, 2023, 62 Pages )

**ABSTRACT**

The Indonesian maritime territory, particularly the Indonesian territorial waters, is an area where various forms of human activities take place. One of the areas where numerous activities occur is the port area, which involves activities such as maritime transportation, business, trade, as well as export and import activities. One of the specific activities in this area is the transfer of goods to and from ships in the port area, known as ship-to-ship transfer. The loading and unloading of goods are part of this activity, involving the movement of specific cargoes that have obtained permission from the port authorities and are accompanied by official documents. Every ship-to-ship transfer activity is governed and supervised by various international and national regulations that provide guidelines and limitations. The research questions in this study are as follows: 1) How is ship-to-ship transfer regulated in International Law? and 2) How is the implementation of ship-to-ship transfer activities in Indonesia? This research adopts a normative juridical research method using secondary data sources supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings of this study indicate that the regulation of ship-to-ship transfer activities in International Law exists in various forms of regulations on specific factors, which are separately explained based on the relevant factors in the content of those regulations. According to UNCLOS 1982, SOLAS 1974, and the MARPOL Convention 1973/1978, there are separate explanations of the implementation of ship-to-ship transfer activities in Indonesia in various regulations, such as Law No. 17 of 2008 on Shipping and Ministerial Regulation of the Indonesian Ministry of Transportation No. 59 of 2021 regarding the implementation of service businesses related to water transportation.

**Keywords: Implementation, Loading and Unloading of Goods, Ports, and Territorial Sea.**